

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari laporan tahunan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama tahun 2021 sampai 2023. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling* dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut.

Tabel 4. 1
Kriteria Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Total
1.	Perusahaan Makanan & Minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2021-2023	97
2.	Perusahaan Makanan & Minuman yang mengalami kerugian selama tahun pengamatan 2021-2023	(34)
3.	Perusahaan Makanan & Minuman yang datanya tidak komprehensif untuk penelitian ini	(23)
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah	(2)
Jumlah perusahaan yang terpilih sebagai sampel		38
Jumlah sampel penelitian (38 x 3 tahun)		114
<i>Outlier</i>		(4)
Jumlah sampel penelitian setelah <i>outlier</i>		110

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sampel sebanyak 38 perusahaan selama periode 3 tahun, dikurangi dengan data *outlier* sebanyak 4, sehingga total data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 110 data.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum variabel dalam penelitian. Hasil uji yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variable	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Variance
Direktur Perempuan	110	0	0,75	0,1413	0,20378	0,041
Kesulitan Keuangan	110	0,06	4,94	0,7557	0,77861	0,609
Besaran Perusahaan	110	24,94	33,56	29,3117	1,89784	3,594
Penghindaran Pajak	110	0,02	0,41	0,2232	0,05907	0,004

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Pengolahan data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel direktur perempuan diukur berdasarkan proporsi jumlah direksi perempuan dalam anggota direksi pada sebuah perusahaan. Secara teori, semakin banyak jumlah direktur perempuan, maka semakin sedikit peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai minimum variabel ini adalah 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tidak terdapat keterlibatan direktur perempuan dalam struktur dewan direksi. Secara teori, hal ini akan berpotensi pada penghindaran pajak yang semakin tinggi. Nilai maksimumnya sebesar 0,75 diperoleh PT Nippon Indosari Corporindo Tbk pada tahun 2021, hasil ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk cukup rendah. Nilai rata-rata yang diperoleh variabel ini sebesar 0,1413. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata proporsi keterwakilan perempuan dalam posisi direktur masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar

14,13%. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam struktur direksi perusahaan-perusahaan sampel, keterlibatan perempuan masih terbatas. Nilai standar deviasi sebesar 0,203708 dan varians sebesar 0,041. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa distribusi data cenderung menyebar di luar nilai rata-ratanya. Selain itu, variasi antar perusahaan dalam hal ini tergolong kecil hingga sedang. Sebagian besar perusahaan masih didominasi oleh direktur laki-laki, dan hanya sedikit perusahaan yang memiliki proporsi perempuan yang signifikan dalam struktur direksi.

Variabel kesulitan keuangan diukur melalui rasio total liabilitas terhadap total ekuitas. Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi, akan berakibat terjadinya *financial distress*. Perusahaan yang pembiayaan operasionalnya lebih banyak menggunakan hutang, dapat memiliki resiko yang lebih tinggi terjadinya kesulitan keuangan di masa yang akan datang. Hasil pengujian menunjukkan nilai minimum sebesar 0,06 diperoleh PT Formosa Ingredient Factory Tbk pada tahun 2021, hal ini menandakan bahwa pada tahun 2021 PT Formosa Ingredient Factory Tbk memiliki kesulitan keuangan yang rendah, sehingga secara teoritis memiliki potensi yang rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Nilai maksimum sebesar 4,94 diperoleh Sawit Sumbermas Sarana Tbk pada tahun 2023, hal ini mengindikasikan rasio hutang pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk cukup tinggi yang akan berakibat pada kesulitan membayar hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo, sehingga hal itu akan berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 0,7557. Hal

ini menunjukkan bahwa secara umum, perusahaan dalam sampel berada dalam kondisi keuangan yang relatif stabil dan tidak mengalami tekanan keuangan yang signifikan. Sementara standar deviasinya tercatat sebesar 0,77861 dan varians sebesar 0,609 mengindikasikan bahwa standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-ratanya, hal ini berarti data memiliki penyebaran diluar dari nilai rata-ratanya. Selain itu variasi tersebut menunjukkan adanya keragaman sedang dalam tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang diteliti. Data ini memberikan sinyal penting dalam mengevaluasi apakah kesulitan keuangan menjadi salah satu determinan dalam keputusan manajemen terkait penghindaran pajak.

Variabel besaran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aset. Hasil menunjukkan, variabel besaran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 24,94 (67,76 Miliar) diperoleh PT Wahana Inti Makmur Tbk pada tahun 2021, hasil ini mengindikasikan bahwa besaran perusahaan PT Wahana Inti Makmur Tbk cukup kecil, sehingga penghindaran pajak pada perusahaan tersebut tergolong rendah. Nilai maksimum sebesar 33,56 (Rp 375,75 Triliun) diperoleh PT Indo Boga Sukses Tbk.pada tahun 2023, yang menandakan bahwa besaran perusahaan PT Indo Boga Sukses Tbk cukup besar, sehingga semakin tinggi potensi untuk melakukan penghindaran pajak. Nilai rata-rata tercatat sebesar 29,3117 (Rp 5,44 Triliun), hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan skala menengah hingga besar. Sementara itu, terdapat nilai standar deviasi sebesar 1,8978 dan varians sebesar 3,594. Nilai deviasi standar yang lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa data cenderung

terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Selain itu, hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat variasi yang cukup moderat antar perusahaan. Besaran perusahaan yang besar dapat memberikan kapasitas sumber daya yang lebih besar dalam melakukan perencanaan dan manajemen pajak, termasuk dalam penyusunan strategi penghindaran pajak.

Variabel penghindaran pajak diproksikan dengan ETR yaitu dengan membandingkan beban pajak dan penghasilan sebelum pajak. Nilai ETR yang semakin mendekati 0, maka semakin besar penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya nilai ETR yang mendekati 1 maka semakin rendah penghindaran pajak perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum tercatat sebesar 0,02 yang diperoleh oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada tahun 2021, hasil ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada tahun 2021 cukup tinggi karena nilai ETR yang diperoleh mendekati 0. Nilai maksimum sebesar 0,41 diperoleh oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk pada tahun 2021 yang mengindikasikan bahwa penghindaran pajak PT Salim Ivomas Pratama Tbk pada tahun 2021 cukup rendah karena nilai ETR yang diperoleh semakin mendekati 1. Nilai rata-rata variabel ini adalah 0,2232. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dalam penelitian ini memiliki kecenderungan sedang dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Sementara itu, diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,05907 dan varians sebesar 0,004. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari rata-ratanya mencerminkan bahwa sebaran data cenderung mengelompok di sekitar nilai rata-rata. Selain itu, hasil mengindikasikan bahwa

variasi data dari variabel penghindaran pajak cukup rendah atau cenderung seragam antar perusahaan. Artinya, mayoritas perusahaan memiliki perilaku yang relatif mirip dalam mengelola beban pajaknya, baik dalam bentuk penghindaran pajak secara legal maupun strategi perencanaan pajak yang konservatif.

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi

Variable	Value	Fr.	Min	Max	Median	Std. Dev	Variance
Narsisme CEO	1	0	2	5	3	1,012	1,025
	2	4					
	3	53					
	4	8					
	5	45					
Besaran Dewan Komisaris	1	0	2	9	5	2,584	6,557
	2	23					
	3	18					
	4	3					
	5	15					
	6	9					
	7	10					
	8	17					
	9	15					

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.3, diketahui bahwa variabel narsisme CEO yang diukur menggunakan variabel ordinal dengan rentang skor 1 hingga 5 memiliki nilai minimum sebesar 2 yang dapat oleh 3 perusahaan yaitu Sariguna Primatirta Tbk, Dharma Satya Nusantara Tbk, dan Multi Bintang Indonesia Tbk. Hasil ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut cukup rendah. Nilai maksimum sebesar 5 didapat oleh 45 sampel penelitian, salah satunya adalah Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, hasil ini menandakan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut cukup tinggi. Nilai median sebesar 3 menunjukkan

bahwa tingkat narsisme CEO pada sampel penelitian berada pada kategori sedang. Hal ini mengimplikasikan bahwa kecenderungan CEO dalam melakukan penghindaran pajak berada pada level moderat. Sebaran data ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 1,012 dan nilai varians sebesar 1,025. Nilai standar deviasi yang relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya mengindikasikan bahwa penyebaran data cukup rendah dan sebagian besar nilai cenderung tersebar di sekitar rata-rata. Data ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian, sebagian besar CEO memiliki karakteristik narsistik yang cukup dominan, yang secara teoritis dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

Variabel besaran dewan komisaris yang diukur berdasarkan jumlah total dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dewan dengan jumlah yang besar dapat menekan praktik penghindaran pajak perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 2, salah satunya perusahaan yang memperoleh nilai 2 adalah BISI International Tbk. Hasil ini menandakan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut cukup tinggi. Nilai maksimum sebesar 9, salah satunya diperoleh oleh Dharma Satya Nusantara Tbk. Hasil ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut cukup rendah. Posisi median pada angka 5 mencerminkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel tidak didominasi oleh dewan yang terlalu kecil maupun terlalu besar. Persebaran data ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 2,584 dan nilai varians sebesar 6,557. Karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data relatif

dekat dengan nilai rata-ratanya. Nilai varians yang cukup tinggi mencerminkan adanya keragaman yang cukup tinggi dalam jumlah anggota dewan antar perusahaan. Hal ini dapat menggambarkan adanya variasi dalam kebijakan pengawasan yang diemban oleh dewan komisaris. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel praktik penghindaran pajak yang cenderung sedang.

4.2.2 Uji Model Regresi

Persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian adalah sebagai berikut.

$$\text{ETR}_{i,t} = 0,095 - 0,006\text{CN}_{i,t} - 0,008\text{BoZ}_{i,t} - 0,027\text{FD}_{i,t} + 0,009\text{FcDi}_{i,t} + 0,006\text{CZ}_{i,t} + \varepsilon$$

Analisis terhadap persamaan regresi tersebut dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 25, dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Model Regresi

	Collinearity Statistics		Uji Glejser	Uji Asumsi t		
	Tolerance	VIF	Sig.	β	t	Sig.
(constant)			0,396	0,095	1,027	0,307
CN	0,875	1,143	0,710	-0,006	-1,024	0,308
BoZ	0,819	1,220	0,637	-0,008	-3,400	0,001
FD	0,885	1,130	0,862	-0,027	-0,975	0,332
FcD	0,941	1,062	0,649	0,009	1,259	0,211
CZ	0,780	1,283	0,115	0,006	2,014	0,047
Durbin-Watson						1,860
Test Statistic Kolmogorov-Smirnov						0,075
Asymp Sig. One Sample Kolmogorov-Smirnov						0,163
Uji Statistik F						3,496

Sig Simultan	0,006
Adjusted R Square (R^2)	0,044
Std. Error of the Estimate	0,37214

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi mengandung variabel pengganggu yang tidak berdistribusi normal. Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil pengujian normalitas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,163 (sig. > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui gejala multikolinearitas dalam data penelitian tersebut dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF pada output regresi. Hasil pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang berupa Narsisme CEO, Besaran dewan komisaris, Direktur Perempuan, Kesulitan Keuangan, dan Besaran Perusahaan bebas dari gejala multikolinearitas. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) setiap variabel lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai *Tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,10 ($Tolerance > 0,10$). Adapun variabel Narsisme CEO memiliki nilai VIF sebesar 1,143 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,875; variabel Besaran dewan komisaris memiliki nilai VIF sebesar 1,220 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,819; variabel Direktur Perempuan memiliki nilai VIF sebesar 1,130 dan

nilai *Tolerance* sebesar 0,885; variabel Kesulitan Keuangan memiliki nilai VIF sebesar 1,062 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,941, dan variabel Besaran Perusahaan memiliki nilai VIF sebesar 1,283 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,780.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji glejser pada Tabel 4.4 menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel independen yang berupa Narsisme CEO, Besaran dewan komisaris, Direktur Perempuan, Kesulitan Keuangan, dan Besaran Perusahaan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai signifikansi setiap variabel independen lebih besar dari 0,05 ($\text{sig.} > 0,05$). Variabel Narsisme CEO, Besaran Dewan Komisaris, Direktur Perempuan, Kesulitan Keuangan, dan Besaran Perusahaan secara berturut-turut memiliki nilai signifikansi sebesar 0,710; 0,637; 0,862; 0,649; dan 0,115.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji adanya gejala autokorelasi dalam data penelitian yang digunakan. Berdasarkan Tabel 4.4, diperoleh nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,860. Sesuai dengan Tabel Durbin-Watson, diketahui bahwa nilai batas atas Durbin-Watson (d_U) adalah 1,7851, sehingga diperoleh nilai $4-d_U$ sebesar 2,2149. Nilai Durbin-Watson (d) yang terletak pada *range* $d_U \leq d \leq (4-d_U)$ atau $1,7851 \leq 1,860 \leq 2,2149$ menandakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

Berdasarkan seluruh hasil uji asumsi klasik, membuktikan bahwa model regresi tersebut terdistribusi secara normal dan terbebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bersifat *Best, Linear, Unbiased, Estimator* (BLUE) sesuai dengan penggunaan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS).

4.2.2.2 Fit Data

1. Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.3, diperoleh nilai F_{hitung} adalah sebesar 3,496 dan diketahui nilai F_{tabel} pada tabel titik persentase distribusi F adalah 2,30, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3,496 > 2,30$). Selain itu, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006 ($sig. < 0,05$). Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji statistik F, diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen yang berupa Narsisme CEO, Besaran Dewan Komisaris, Direktur Perempuan, Kesulitan Keuangan, dan Besaran Perusahaan secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen Penghindaran Pajak.

2. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi atau R^2 dapat dilihat melalui nilai *Adjusted R Square*. Berdasarkan Tabel 4.3, nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,044. Hal ini berarti variabel independen yang berupa Narsisme CEO, Besaran Dewan Komisaris, Direktur Perempuan, Kesulitan Keuangan, dan Besaran Perusahaan dalam model regresi mampu menjelaskan 4,4% variasi dalam variabel

dependen Penghindaran Pajak. Sementara 95,6% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

4.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen meliputi narsisme CEO, besaran dewan komisaris, direktur perempuan, kesulitan keuangan dan besaran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Penilaian dilakukan berdasarkan nilai signifikansi setiap variabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil uji t disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5
Hasil Uji t

Uji Hipotesis		
	β	Sig.
Narsisme CEO	-0,006	0,308
Besaran Dewan Komisaris	-0,008	0,001
Direktur Perempuan	-0,027	0,332
Kesulitan Keuangan	0,009	0,211
Besaran Perusahaan	0,006	0,047

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter (uji t) pada model regresi yang telah disajikan dalam tabel 4.4, maka kesimpulan dari uji hipotesis yang diperoleh melalui analisis pada tabel 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 dirangkum dalam tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	β	Sig.	Hasil Keputusan
H ₁ : Narsisme CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan	-0,006	0,308	ditolak
H ₂ : Besaran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan	-0,008	0,001	diterima
H ₃ : Perusahaan dengan jumlah direktur perempuan yang banyak memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah	-0,027	0,332	ditolak
H ₄ : Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan	0,009	0,211	ditolak
H ₅ : Besaran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan	0,006	0,047	diterima

Berdasarkan hasil analisis uji t pada Tabel 4.4, menunjukkan bahwa nilai koefisiensi (β) variabel Narsisme CEO (X1) adalah sebesar -0,006 dan nilai signifikansi pengaruh Narsisme CEO terhadap Penghindaran Pajak adalah 0,308 (sig. > 0,05). Sesuai hasil uji, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama (H₁) ditolak**. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen Narsisme CEO secara parsial berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak.

Nilai koefisiensi (β) variabel Besaran Dewan Komisaris (X2) adalah sebesar -0,008 dan nilai signifikansi pengaruh Besaran Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak adalah 0,001 (sig. < 0,05). Sesuai hasil uji, dapat disimpulkan

bahwa **hipotesis kedua (H_2) diterima**. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen Besaran Dewan Komisaris secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak.

Nilai koefisiensi (β) variabel Direktur Perempuan (X3) adalah sebesar - 0,027 dan nilai signifikansi pengaruh Direktur Perempuan terhadap Penghindaran Pajak adalah 0,332 (sig. > 0,05). Sesuai hasil uji, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga (H_3) ditolak**. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen Direktur Perempuan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak.

Nilai koefisiensi (β) variabel Kesulitan Keuangan (X4) adalah sebesar 0,009 dan nilai signifikansi pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak adalah 0,211 (sig. > 0,05). Sesuai hasil uji, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keempat (H_4) ditolak**. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen Kesulitan Keuangan secara parsial berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak.

Nilai koefisiensi (β) variabel Besaran Perusahaan (X5) adalah sebesar 0,006 dan nilai signifikansi pengaruh Besaran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak adalah 0,047 (sig. < 0,05). Sesuai hasil uji, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kelima (H_5) diterima**. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen Besaran Perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak.

4.4 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Narsisme CEO terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa narsisme CEO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiyaya & Putra (2025), yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara CEO narsistik dengan penghindaran pajak perusahaan. Kecenderungan narsistik CEO yang diukur melalui indikator visual, seperti besaran dan frekuensi kemunculan foto dalam laporan keuangan perusahaan, tidak berhubungan signifikan dengan strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

Konsep teori atribusi, pada dasarnya menjelaskan bagaimana individu memberikan penilaian terhadap perilaku individu lain, termasuk dalam mengidentifikasi alasan di balik tindakan tersebut serta tujuan yang ingin dicapai melalui perilaku itu. Penelitian ini memanfaatkan teori atribusi dalam memahami bagaimana sifat personal seorang pemimpin (narsisme) berdampak pada pengambilan keputusan. Seorang CEO yang memiliki sifat narsistik cenderung melihat dirinya sebagai pusat keberhasilan perusahaan dan memiliki kepercayaan diri yang berlebihan. Berdasarkan teori atribusi, individu narsistik cenderung mengatribusikan kesuksesan kepada kemampuan pribadi mereka dan menyalahkan faktor eksternal ketika terjadi kegagalan. Kewajiban pajak dalam bidang perpajakan sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.. Namun, seorang CEO yang narsistik dapat melihat

strategi penghindaran pajak sebagai bentuk kecerdikan dan kemampuan manajerialnya dalam meningkatkan keuntungan perusahaan, serta sebagai sarana untuk memperkuat citra diri sebagai pemimpin yang “hebat” dan efektif. Oleh karena itu, berdasarkan teori atribusi, narsisme dapat mendorong CEO untuk memilih tindakan yang memperkuat persepsi atas kompetensi diri mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan agresif seperti penghindaran pajak. Secara teoritis, narsisme CEO dianggap sebagai karakter pimpinan yang dapat mendorong praktik penghindaran pajak, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa narsisme CEO tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana *et al.* (2023), yang menyatakan bahwa sifat narsistik CEO tidak dapat dijadikan sebagai indikator yang efektif untuk mengidentifikasi atau memprediksi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel narsisme CEO menunjukkan perolehan skor 5 sebanyak 45 data, sementara skor terendah yaitu 2 hanya ditemukan pada 4 data. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki karakteristik CEO yang narsistik, yang cenderung lebih agresif pada penghindaran pajak. Nilai standar deviasi sebesar 1,012 dan variasi sebesar 1,025, mencerminkan bahwa sebagian besar CEO dalam sampel penelitian memiliki tingkat narsisme yang relatif tinggi dan tersebar cukup merata di sekitar nilai tengah. Meskipun secara teoritis individu dengan karakter narsistik cenderung terdorong untuk mengejar pengakuan dan citra keberhasilan, sehingga berpotensi lebih agresif dalam pengambilan keputusan strategis seperti praktik

penghindaran pajak, tetapi data statistik menunjukkan bahwa variasi dalam tingkat narsisme tidak secara signifikan mencerminkan perbedaan dalam perilaku penghindaran pajak antar perusahaan. Nilai standar deviasi yang relatif kecil dibandingkan rata-rata menunjukkan rendahnya tingkat penyebaran data, yang mengindikasikan bahwa mayoritas CEO dalam sampel memiliki tingkat narsisme yang hampir seragam. Hal tersebut dibuktikan dengan ukuran foto yang sama setiap periode pada mayoritas perusahaan sampel, sehingga menyulitkan untuk mendeteksi adanya hubungan yang kuat antara tingkat narsisme dan praktik penghindaran pajak, karena kurangnya keragaman dalam nilai variabel dapat mengurangi kekuatan diskriminatif analisis statistik. Ketika mayoritas data terkonsentrasi pada kategori narsisme yang tinggi, maka variabel ini kehilangan kemampuannya untuk menjelaskan perbedaan perilaku penghindaran pajak antar perusahaan.

Selain itu, meskipun beberapa perusahaan yang memiliki skor narsisme CEO tinggi (seperti Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan skor 5) dan juga tercatat memiliki praktik penghindaran pajak yang tinggi, hubungan ini tidak berlaku secara konsisten di seluruh sampel. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain di luar karakter narsistik CEO kemungkinan lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan penghindaran pajak, seperti tekanan regulasi, etika perusahaan, tata kelola, atau faktor eksternal seperti tekanan pasar dan reputasi. Oleh karena itu, meskipun teori atribusi menjelaskan bahwa sifat narsistik dapat mempengaruhi perilaku strategis, temuan deskriptif ini mendukung hasil bahwa

dalam konteks sampel yang dianalisis, narsisme CEO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.3.2 Pengaruh Besaran Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa besaran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021), yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka akan semakin mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka akan semakin meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan

Teori pengambilan keputusan rasional komprehensif menjelaskan bahwa suatu keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok didasarkan pada proses yang sistematis, rasional, dan mempertimbangkan seluruh alternatif serta konsekuensi yang mungkin terjadi sebelum memilih opsi terbaik. Menurut teori ini, besaran dewan komisaris yang lebih besar menunjukkan bahwa peran penting dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan. Besaran dewan komisaris yang lebih besar cenderung mencerminkan keberagaman perspektif, latar belakang, dan keahlian yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan secara kolektif. Ketika keputusan strategis seperti penghindaran pajak dibahas, keberadaan lebih banyak anggota komisaris memungkinkan pertimbangan yang lebih menyeluruh terhadap risiko, dampak

hukum, dan konsekuensi reputasi yang dapat timbul, sehingga berpotensi menekan kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif. Melalui proses pengawasan yang ketat dan keputusan yang diambil secara rasional serta berdasarkan pertimbangan yang komprehensif, dewan komisaris yang berjumlah besar mampu meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Pratomo & Rana 2021). Oleh karena itu, berdasarkan teori ini, besaran dewan komisaris yang besar secara teoritis memiliki peran dalam meminimalisir praktik penghindaran pajak, karena setiap keputusan strategis perusahaan harus melalui proses evaluasi yang rasional dan menyeluruh oleh dewan sebelum disetujui atau dijalankan oleh manajemen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep teori pengambilan keputusan rasional komprehensif, yang menekankan bahwa pengambilan keputusan yang efektif dilakukan melalui proses yang logis, sistematis, dan mempertimbangkan berbagai alternatif serta konsekuensinya secara menyeluruh. Menurut teori ini, besaran dewan komisaris yang lebih besar menunjukkan bahwa maka semakin besar pula kapasitas kolektif dalam meninjau, mengawasi, dan mengevaluasi setiap keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa besaran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin besar jumlah dewan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung menurun.

Temuan ini juga didukung oleh data statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah dewan komisaris paling sedikit, yaitu 2 orang,

termasuk BISI International Tbk cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah dewan yang lebih besar, seperti 9 orang, salah satunya Dharma Satya Nusantara Tbk menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Nilai standar deviasi sebesar 2,584 dan variasi sebesar 6,557, yang menunjukkan bahwa sebaran data cukup terkonsentrasi di sekitar nilai tengah, meskipun terdapat variasi yang signifikan antara perusahaan satu dengan yang lain. Distribusi frekuensi menunjukkan adanya keragaman jumlah dewan komisaris, yang juga merefleksikan variasi dalam kapasitas pengawasan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan teori pengambilan keputusan rasional komprehensif, temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan dewan komisaris yang lebih besar cenderung memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang lebih rasional dan hati-hati, sehingga mampu menekan risiko terjadinya praktik penghindaran pajak.

4.3.3 Pengaruh Direktur Perempuan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa direktur perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mala & Ardianto (2021), yang menunjukkan bahwa direktur perempuan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa kehadiran perempuan dalam jajaran direksi tidak berhubungan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu memberikan penilaian dan interpretasi terhadap perilaku orang lain, dengan memperhatikan penyebab

perilaku individu tersebut. Terkait konteks kehadiran direktur perempuan di jajaran manajemen perusahaan, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana karakteristik internal perempuan seperti tingkat kehati-hatian, kepedulian etis, dan orientasi terhadap kepatuhan yang mempengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Direktur perempuan sering dikaitkan dengan gaya kepemimpinan yang lebih berorientasi pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas, yang secara atribusional dinilai memiliki motivasi internal untuk menghindari tindakan yang beresiko atau menyimpang secara etika. Oleh karena itu, berdasarkan teori atribusi, partisipasi perempuan dalam struktur direksi dapat diasosiasikan dengan dorongan internal untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan norma dan peraturan, termasuk penghindaran pajak yang agresif. Keberadaan direktur perempuan di dalam perusahaan dipersepsikan sebagai faktor internal yang mempengaruhi arah kebijakan perusahaan menuju tindakan yang lebih hati-hati dan sesuai dengan regulasi perpajakan. Oleh karena itu, teori atribusi mendukung asumsi bahwa keberadaan direktur perempuan berpotensi mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perilaku etis dan komitmen terhadap kepatuhan dipandang sebagai bagian dari nilai-nilai pribadi yang mempengaruhi keputusan mereka dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan dan pengambilan keputusan.

Meskipun teori atribusi menyatakan bahwa perilaku individu, termasuk pengambilan keputusan strategis, sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti nilai pribadi, moralitas, dan sikap etis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

variabel direktur perempuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori atribusi, perempuan dalam posisi direktur umumnya diasumsikan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi terhadap integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga seharusnya dapat menekan praktik penghindaran pajak. Namun, temuan statistik deskriptif menunjukkan bahwa proporsi direktur perempuan dalam perusahaan masih sangat rendah, dengan nilai rata-rata hanya sebesar 0,1413 atau sekitar 14,13%. Bahkan, sebagian besar memiliki nilai 0,00, yang berarti tidak terdapat keterlibatan direktur perempuan sama sekali dalam struktur direksi perusahaan-perusahaan tersebut. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi strategis ini mengindikasikan bahwa pengaruh potensial mereka terhadap kebijakan perusahaan, termasuk keputusan perpajakan, menjadi sangat terbatas. Meskipun terdapat perusahaan dengan proporsi direktur perempuan tinggi, seperti PT Nippon Indosari Corporindo Tbk (dengan nilai 0,75) menunjukkan nilai ETR rendah sebesar 0,08, yang menandakan meskipun proporsi direktur perempuan dalam jajaran direksi tinggi, hal ini masih terdapat adanya praktik penghindaran pajak. Kasus tersebut bersifat pengecualian dan tidak mencerminkan tren keseluruhan. Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 0,2037 yang lebih tinggi daripada rata-ratanya menunjukkan bahwa data tersebar cukup luas dan tidak terkonsentrasi, sehingga memperkuat asumsi bahwa tidak terdapat pola konsisten antara proporsi direktur perempuan dan tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu, rendahnya keterlibatan perempuan dalam struktur direksi menjelaskan mengapa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak,

karena nilai-nilai personal yang diasosiasikan dengan perilaku etis dan patuh terhadap regulasi tidak cukup mewakili keseluruhan keputusan strategis perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks empiris, kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan belum cukup dominan untuk mempengaruhi kebijakan penting seperti strategi penghindaran pajak, meskipun secara teori memiliki potensi tersebut.

4.3.4 Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kesulitan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari & Sudjawoto (2021), yang menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kesulitan keuangan dengan penghindaran pajak perusahaan, artinya kondisi keuangan yang sulit tidak memiliki hubungan signifikan dengan strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

Menurut konsep teori atribusi, individu atau organisasi menilai penyebab dari suatu perilaku berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Manajemen mungkin mengatribusikan kesulitan keuangan kepada situasi eksternal. Konsep teori atribusi menyatakan bahwa kesulitan yang dihadapi perusahaan dikaitkan dengan motivasi eksternal untuk mempertahankan kelangsungan usaha, termasuk melalui strategi penghindaran pajak sebagai bentuk efisiensi biaya. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesulitan

keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa, rata-rata rasio total liabilitas terhadap ekuitas perusahaan dalam sampel berada pada angka 0,7557, yang mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang relatif stabil dan tidak mengalami tekanan keuangan yang berat. Selain itu, sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berada dalam kondisi keuangan yang menguntungkan atau memperoleh laba selama periode penelitian. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung tidak bergantung pada pembiayaan melalui utang.

Meskipun terdapat perusahaan dengan rasio tinggi seperti Sawit Sumbermas Sarana Tbk dengan rasio 4,94, yang secara teoritis berpotensi tinggi untuk melakukan penghindaran pajak, jumlah kasus seperti ini relatif sedikit dan tidak mencerminkan keseluruhan pola dalam sampel. Di sisi lain, perusahaan dengan rasio rendah seperti PT Formosa Ingredient Factory Tbk dengan rasio 0,06 juga ditemukan dalam sampel, memperkuat argumen bahwa mayoritas perusahaan tidak mengalami tekanan keuangan yang mendorong perlunya strategi penghindaran pajak. Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 0,77861 yang lebih besar daripada nilai rata-rata mengindikasikan adanya penyebaran data yang cukup luas di luar nilai tengah, namun keragaman tersebut tergolong sedang dan belum cukup kuat untuk menciptakan hubungan yang konsisten antara kesulitan keuangan dan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam konteks empiris, kesulitan keuangan belum terbukti menjadi faktor atribusional yang dominan dalam mempengaruhi keputusan manajemen terkait penghindaran pajak,

karena sebagian besar perusahaan dalam sampel tidak berada dalam kondisi keuangan yang ekstrem dan masih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara normal.

4.3.5 Pengaruh Besaran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa besaran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyaya & Putra (2025), yang juga memaparkan bahwasannya besaran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Besaran perusahaan yang lebih besar cenderung menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, karena semakin besar perusahaan, semakin besar pula peluang dan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan strategi penghindaran pajak

Berdasarkan konsep teori *political cost*, perusahaan besar cenderung menjadi sorotan publik dan regulator karena pengaruh ekonomi dan sosialnya. Perusahaan besar yang sangat diawasi memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang terstruktur agar terhindar dari resiko reputasi dan sanksi hukum (Pratama & Mukhhtaruddin, 2025). Untuk mempertahankan citra reputasi yang positif di mata pemerintah, investor, maupun masyarakat, perusahaan dihadapkan pada sejumlah biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan-tindakan yang bersifat politis. Sehingga, untuk meminimalkan "biaya politik" tersebut, perusahaan besar seringkali mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi beban pajaknya. Penghindaran pajak menjadi salah satu cara untuk

menjaga agar perusahaan tetap kompetitif dan mempertahankan nilai perusahaan di tengah ekspektasi publik yang tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan sudut pandang dalam teori *political cost*. Teori tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menjadi perhatian publik dan pemerintah karena skala operasionalnya yang luas serta pengaruh ekonominya yang signifikan. Meskipun dalam banyak literatur disebutkan bahwa perusahaan besar cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak untuk menghindari tekanan politik dan regulasi (*political visibility*), pandangan alternatif dari teori ini juga menyebutkan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya, akses informasi, dan kemampuan finansial yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif namun tetap legal. Temuan penelitian bahwa perusahaan yang lebih besar justru cenderung melakukan penghindaran pajak menguatkan pandangan tersebut. Temuan penelitian ini menjadi relevan, mengingat mayoritas sampel dalam penelitian ini tergolong ke dalam kategori perusahaan besar.

Hal ini diperkuat oleh hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai maksimum dari besaran perusahaan sebesar 33,56 (Rp 375.75 Triliun) diperoleh oleh PT Indo Boga Sukses Tbk pada tahun 2023, yang memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan besaran terkecil yaitu PT Wahana Inti Makmur Tbk dengan skala 24,94 (Rp 67.76 Miliar) menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang rendah. Rata-rata besaran perusahaan sebesar 29,3117 (Rp 5,44 Triliun)

menunjukkan bahwa sebagian besar sampel adalah perusahaan skala menengah hingga besar, yang umumnya memiliki kapabilitas untuk menyusun strategi perpajakan yang kompleks. Meskipun nilai standar deviasi sebesar 1,8978 lebih kecil dari rata-ratanya, yang menandakan data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah, tetap terdapat variasi besaran yang cukup moderat antar perusahaan. Variasi ini memungkinkan analisis yang valid mengenai hubungan antara skala perusahaan dan kecenderungan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan aset yang besar cenderung memiliki dorongan untuk memanfaatkan kapasitas internal mereka dalam melakukan efisiensi pajak, termasuk strategi penghindaran pajak, yang mendukung relevansi teori *political cost* dalam konteks positif yang mengatakan bahwa perusahaan besar memanfaatkan keunggulan sumber daya untuk mengurangi beban pajak, meskipun beresiko mendapatkan tekanan politik yang lebih tinggi.